

LAPORAN BPK

Seriusi Aset dan Hibah

LAPORAN Hasil Pemeriksaan BPK-RI, dua tahun berturut selalu mengupas persoalan aset dan hibah dari Kabupaten Pontianak kerap menjadi catatan. Oleh karena itu, harus ada sikap serius supaya opini wajar dengan pengecualian (WDP) menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Memang butuh kerja keras dan perjuangan seluruh pihak," ujar Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, Rabu (15/8) dalam paripurna sidang pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kubu Raya tahun anggaran 2011. Bupati tak menampik bahwa soal aset dan hibah aset, sempat menempatkan laporan keuangan Pemkab Kubu Raya di mata BPK RI sebagai opini tidak wajar. Namun beruntungnya, mengenai aset dan hibah dari kabupaten induk, Kabupaten Pontianak, dijelaskan Bupati, secara perlahan sudah dirapikan dan ditata dengan baik. "Makanya di laporan keuangan tahun 2011, BPK RI memberikan opini wajar dengan pengecualian. Namun itu tidak membuat kita cepat puas. Sebab, pemerintah pusat sudah menggariskan pada tahun 2014 mendatang, ideal laporan keuangan kabupaten/kota adalah wajar tanpa pengecualian (WTP)," ucapnya. Ia menambahkan pada prinsipnya Pemkab Kubu Raya terkait mengenai aset terus dan mulai melakukan pembenahan baru. Bahkan, kemarin BPK RI sudah masuk khusus membahas dan mengupas mengenai aset. "Kami bersyukur karena tujuannya membantu Pemkab Kubu Raya. Dan kami optimis ini akan lebih mempermudah mengejar opini yang paling terbaik dinilai BPK RI," ujarnya.

Diingatkan Muda bahwa opini dikejar bukan sebagai pencitraan. Namun bagaimana mengelola pemerintahan dan transparansinya, harus tetap terkontrol di tingkat internalnya. Sementara kemarin baru saja pemeriksaan BPK RI dilakukan. Namun dari tim kabupaten ini tetap jalan terus dan tidak pernah berhenti untuk terus menyampaikan laporan keuangan mengejar opini WTP.

Sementara itu, ketua DPRD Kubu Raya, Sujiwo, mengatakan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2011 pada paripurna pertama sudah dilakukan. Bupati menyampaikan dalam bentuk pidato nota pengantar terkait erat keuangan tahun 2011. Berkaitan dengan hal itu, DPRD akan membentuk pansus untuk membedahnya berfsama-sama. Meskipun demikian, dia menambahkan bahwa DPRD Kubu Raya memuji langkah Pemkab yang berhasil mendapatkan opini WDP. Itu, menurutnya, adalah bentuk pengecualian dan upaya Pemkab memperbaiki kinerjanya, khusus mengelola keuangan dan aset. "Memang dua kali penilaian BPK terfokus ke soal aset dan hibah. Memang harus ada upaya juga kerja keras SKPD terkait supaya kedepannya mendapat WTP," usulnya. (den)